Volume 6 Nomor 2 Edisi September 2020
Jurnal Pendidikan Non Formal
ISSN: 2442-5842

TRANSFORMASI

Jurnal Penelitian dan Pengembngan Pendidikan Non Formal-Informal

TRANSFORMASI

Diterbitkan Oleh:
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN DAN PSIKOLOGI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN MANDALIKA

Volume 6 Nomor 2 Edisi September 2020 **ISSN: 2442-5842**
Jurnal Pendidikan Non Formal

TRANSFORMASI

Jurnal Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Non Formal-Informal

Terbit dua kali setahun pada Bulan Maret dan September. Berisi artikel hasil penelitian dan kajian konseptual di bidang Pendidikan Non Formal dan Informal (Pendidikan Luar Sekolah).

Dewan Redaksi

Pelindung dan Penasihat : Prof. Drs. Kusno, DEA., Ph.D
Dr. Akhmad Sukri
Drs. Wayan Tamba, M.Pd

Penanggung Jawab : Herlina, S.P., M.Pd

Ketua Penyunting : Kholisussa'di, S.Pd.,M.Pd

Sekertaris Penyunting : Wahyu Winandi, S.Pd

Penyunting Ahli (Mitra Bestari) :
1. Prof. Dr. Supriyono, M.Pd. (Universitas Negeri Malang)
2. Prof. Dr. Wayan Maba (Universitas Mahasaraswati)
3. Dr. Gunarti Dwi Lestari, M.Pd (Universitas Negeri Surabaya)
4. Drs. Mukhlis, M.Ag. (Universitas Islam Negeri Mataram)

Penyunting Pelaksana :
1. Suharyani, M.Pd.
2. Rila Hardiansyah, M.Pd
3. Lalu Muazzim, M.Pd
4. Ahmad yani, M.Pd.

Pelaksana Ketatalaksanaan :
1. M. Syamsul Hadi, M.Pd
2. Ni Made Sulastri, M.Pd

Desain Cover : Wahyu Winandi, S.Pd

Alamat Redaksi:
Jurusan Pendidikan Luar Sekolah, Fakultas Ilmu Pendidikan, IKIP Mataram
Gedung Dwitiya, Lt.3. Jalan Pemuda No.59 A Mataram
Telp.(0370) 638991
Email: pnf_fip@ikipmataram.ac.id

Jurnal Transformasi menerima naskah tulisan otentik (hasil karya penulis) dan original (belum pernah dipublikasikan) mengenai Pendidikan Luar Sekolah (Pendidikan Non Formal-Informal), Pemberdayaan Masyarakat, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Format penulisan disesuaikan dengan pedoman penulisan yang terdapat pada halaman belakang jurnal ini.

Volume 6 Nomor 2 Edisi September 2020 **ISSN: 2442-5842**
Jurnal Pendidikan Non Formal

TRANSFORMASI

Jurnal Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Non Formal-Informal
Terbit dua kali setahun pada Bulan Maret dan September. Berisi artikel hasil penelitian dan kajian

Daftar Isi

Halaman

Azis Efendi, M. Samsul Hadi

Pengaruh Konseling Humanistik Terhadap Sikap Kejujuran Pada Siswa Kelas XI SMAN 1 Seteluk Tahun Pelajaran 2019/2020.…… **66 - 71**

Hadiyaturido, Khairul Huda, Nur Hidayatul Amni

Penerapan Model *Cooperative Learning* Tipe *Rotating Trio Exchange (RTE)* Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Matematika Materi Perkalian Dan Pembagian Pecahan Siswa Kelas V SD NEGERI 4 Mamben Lauk Tahun Pelajaran 2019/2020……... **72 - 81**

Haromain, Wayan Tamba, Ni Ketut Alit Suarti

Kemitraan Sekolah Dengan Orang Tua Dalam Pelaksanaan Pembelajaran Dalam Jaringan (DARING)…….. **82 - 88**

Herlina, Ni Made Sulastri, Farida Herna Astuti

Efektivitas Model Kemitraan Sekolah Dengan Orang Tua Dalam Pembelajaran *On Line* (Studi Kasus Program Pelibatan Keluarga Di PAUD Kota Mataram)……... **89 - 102**

Ni Made Sulastri

Identifikasi Metode Pembelajaran Yang Diterapkan Guru PAUD Pada Anak Usia Dini 5-6 Tahun……. **103 - 107**

Riskul Ikrama, Kholisussa'di

Hubungan Program Bina Keluarga Lansia (BKL) Terhadap Kelangsungan Hidup Lanjut Usia Di Panti Sosial Tresna Werdha Puspa Karma Mataram Tahun 2019-2020…… **108 - 115**

Suharyani, Wayan Tamba

Penerapan Model *Participatory Rural Appraisal* (PRA) Dalam Mewujudkan Program "Membangun Desa" Dan "Desa Membangun" ……. **116 - 132**

Wiwiek Zainar Sri Utami

Hubungan Antara Pola Asuh Otoriter Dengan Sikap Egois Pada Siswa…… **132 - 142**

Jurnal Transformasi
Volume 6 Nomor 2 Edisi September 2020
PLS FIPP UNDIKMA

PENERAPAN MODEL *PARTICIPATORY RURAL APPRAISAL* (PRA) DALAM MEWUJUDKAN PROGRAM "MEMBANGUN DESA" DAN "DESA MEMBANGUN"

Suharyani, Wayan Tamba

Program Studi Pendidikan Luar Sekolah
Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi (FIPP) UNDIKMA Mataram
Email: **Suharyani@ikipmataram.ac.id**
Wayantamba14@gmail.com

Abstrak: Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk peningkatan kualitas hidup adalah pemberdayaan masyarakat Desa dalam rangka mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa tersebut. Fokus tujuan penelitian adalah untuk mengetahui gambaran program kemasyarakatan yang dilaksanakan oleh Desa Sepapan. Lokasi penelitian mengambil dua dusun yaitu Dusun Orong Bukal dan Batu Golok. Penelitian telah dilaksanakan mulai Juli-Oktober 2020. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif karena Desa Sepapan merupakan desa baru, yang berdiri tahun 2012. Model karakteristik penelitian kualitatif akan sangat memudahkan peneliti dalam menemukan dan memahami pertanyaan penelitian, karena kualitatif menggunakan *multiple methods that are interactive and humanistic*. Penelitian ini akan menghasilkan *output* peneitian yaitu publikasi ilmiah di jurnal prodi (di kampus luar Undikma). Hasil penelitian ada dua yaitu program pembangunan infrastruktur perdesaan (PPIP) dan program posyandu desa. Hal penting dalam PPIP adalah 1) Pelibatan masyarakat miskin dalam program PPIP, 2) Manfaat yang diperoleh, 3) Pelaksana yang ahli, 4) Sumberdaya, 5) Strategi program, 6) Karakteristik lembaga penyelenggara dan 7) Respon masyarakat terhadap program PPIP. Rekam data pada program posyandu adalah terakit 1) Tujuan, sasaran dan fungsi posyandu, 2) Program Kesehatan Ibu dan Anak (KIA), 3) Program KB, 4) Program imunisasi dan 5) Pencegahan dan Penanggulangan Diare atau mencret. Artinya dari hasil penelitian, peneliti tidak menemukan Model PRA dalam pelaksanaan program desa karena Desa Sepapan tergolong desa bar.

Kata kunci : PRA, Infrastruktur, Perdesaan dan Posyandu

PENDAHULUAN

Secara umum, cara pandang masyarakat di era sekarang ini bisa dibilang relatif terbuka terhadap berbagai informasi dan perkembangan pada berbagai dimensi dan level kehidupan. Baik itu tentang kehidupan sosial, politik, ekonomi maupun pembangunan yang berada di kota dan di desa. Fakta ini barangkali sudah menjadi keniscayaan mengingat kita sudah berada pada era yang penuh dengan kemudahan dan kenyamanan yaitu era industri 4.0. Berbicara pembangunan sebagian masyarakat juga sudah sangat peka terkait kemana arah dan kebijakan suatu pembangunan itu akan dilakukan termasuk pembangunan di desa.Karena memang pembangunan desa dihajatkan untuk peningkatan kualitas hidup bagi kesejahteraan masyarakat Desa itu sendiri. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk peningkatan kualitas hidup adalah pemberdayaan masyarakat Desa dalam rangka mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan

meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa tersebut.

Terkait hal tersebut, UU Desa Nomor 6 tahun 2014 menjelaskan bahwa Pemerintah Desa dan masyarakat desa bersama-sama melaksakan pendekatan untuk 'membangun desa' dan 'desa membangun' dengan semangat gotong royong serta memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya alam desa yang ada demi tercapainya peningkatan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Pada sisi lain cepatnya laju pembangunan global yang tidak seimbang dengan kesigapan para aktor pembangunan di level pusat dan daerah menyebabkan negara dan daerah kita tertinggal dalam berbagai aspek, meskipun sumber daya yang ada jumlahnya cukup melimpah. Disamping itu, masyarakat yang semakin kritis dan semakin kompleks permasalahannya membutuhkan pelayanan yang semakin baik, terarah, terpadu dan yang terpenting adalah bagaimana memberdayakan masyarakat dengan segala potensi dan permasalahan yang dihadapinya.

Menyikapi hal tersebut, unsur pemerintahan termasuk di dalamnya para agen perubahan memiliki peran yang strategis dalam melakukan terobosan-terobosan yang mengarah pada perbaikan kondisi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Salah satu cara yang cukup relevan untuk mengkaji kondisi lingkungan pedesaan adalah dengan penerapan pendekatan Participatory Rural Appraisal (PRA), dengan harapan akan tercipta suasana kerja yang kondusif, kolaboratif, adaptif dan partisipatif dalam proses perencanaan pembangunan dan pengelolaan sumber daya yang ada khususnya di wilayah pedesaan. PRA bisa dikatakan sebagai pendekatan dan teknik yang efektif, karena di dalamnya terdapat unsur-unsur tersebut, yaitu teknik-teknik identifikasi, pengukuran dan pelibatan partisipatif masyarakat.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Konsep PRA (*Participatory Rural Appraisal*)

PRA (*Partisipatory Rural Appraisal*) adalah sebuah proses dalam menganalisis, perencanaan dan tindakan. Bank Dunia mendefinisikan PRA sebagai pendekatan partisipatif dan metode yang menekankan pengetahuan lokal dan memungkinkan masyarakat setempat untuk melakukan penilaian, analisis dan perencanaan mereka sendiri. PRA menggunakan visualisasi dan latihan untuk memfasilitasi berbagi informasi, analisis dan tindakan antara para *stake holders* (Uddin, M.N. dan N. Anjuman: 2013), *(*World Bank : 1995).

PRA merupakan metode penelitian aksi yang dikembangkan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Robert Chambers menegaskan bahwa PRA memungkinkan orang desa (baca: masyarakat) dapat mengungkapkan dan menganalisis situasi mereka sendiri serta secara optimal merencanakan dan melaksanakan tekat itu di desanya sendiri (Mikkelsen, 2011:67). Dalam PRA, masyarakat desa berperan aktif dalam pemetaaan masalah sosial dan penyebabnya, peta jalan untuk memcahkan masalah, dan kemudian menuangkan menjadi program, dukungan anggaran, serta implementasinya berbasis pada kerja

sama, keswadayaan, dan kemandirian masyarakat. PRA juga menjadi instrumen yang tepat untuk penilaian atas kebutuhan masyarakat di tingkat lokal (Mueller, 2010:1).

Posisi peneliti dalam PRA adalah sebagai fasilitator, yaitu orang yang memudahkan masyarakat untuk melakukan penelitian aksi tersebut.Melalui partisipasi yang tinggi, warga masyarakat yang terlibat dalam PRA dapat aktif dalam setiap kegiatan kelompok, misalnya pengumpulan data, analisis data, perumusan program, anggaran, dan detail kegiatan, serta implementasinya.Karena bertindak sebagai fasilitator, kegiatan PRA dapat dikatakan berhasil jika kelompok warga dapat aktif dan terus termotivasi untuk menghasilkan CAP (*Community Action Plan*) serta melaksanakannya secara partisipatif.

2. Prinsip Dasar PRA

Menurut Rochdyanto (2000), prinsip dasar yang harus dipenuhi dalam metode PRA adalaha: a) saling belajar dan berbagi pengalaman, b) Keterlibatan semua anggota kelompok, c) Orang luar sebagai fasilitator, d) Penerapan konsep triangulasi (multidisipliner tim PRA, variasi teknik dan keragaman narasumber) dan e) Orientasi praktis dan keberlanjutan program.

Partisipasi masyarakat adalah sebuah pendekatan untuk memberikan kesempatan bagi masyarakat terlibat secara langsung dalam proses pengambilan keputusan terkait urusanurusan publik agar keputusan yang diambil didasari informasi yang mendekati sempurna (quasi-perfect information) dengan tingkat penerimaan masyarakat yang tinggi. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan perdesaan adalah partisipasi langsung.Partisipasi langsung (bukan partisipasi perwakilan) merupakan pendekatan partisipatif yang lebih banyak bermain pada skala mikro (RT, RW, dusun, dan desa).

Kesempatan yang diberikan kepada masyarakat untuk berpartisipasi juga harus disertai kewenangan yang memadai sehingga pendekatan partisipatif juga mencakup distribusi ulang kekuasaan (redistribution of power), bukan sekadar partisipasi semu.Meskipun demikian, masyarakat tidak dibiarkan sendiri dalam memanfaatkan kesempatan yang dibuka dan kewenangan yang didistribusikan.Agar pemanfaatannya dapat lebih bertanggungjawab dan berkualitas, maka diperlukan proses-proses pengorganisasian, pendampingan, penguatan, dan pemberdayaan yang dilakukan oleh pihak-pihak luar.

Pelibatan pihak luar dalam pendekatan partisipatif adalah untuk mengorganisir, mendampingi, menguatkan, dan memberdayakan dengan tujuan akhir adalah keberdayaan masyarakat.Dengan demikian, ada syarat agar pendekatan partisipatif menjadi bermakna dan bukan partisipasi kosong belaka.Syarat tersebut adalah kesediaan pemerintah (pusat sampai desa) untuk memberikan kesempatan dengan kewenangan kepada masyarakat pada proses-proses pengambilan keputusan.

3. Siklus dan Tahapan PRA

Adapun siklus yang dilalui untuk pendekatan PRA adalah : (a) Pengenalan masalah/kebutuhan dan potensi wilayah pedesaan secara umum; (b) Perumusan masalah dan penetapan prioritas masalah; (c) Identifikasi alternatif pemecahan masalah; (d) Pemilihan alternatif pemecahan masalah sesuai dengan kemampuan masyarakat dan sumberdaya yang tersedia; (e) Perencanaan penerapan gagasan; (f) Penyajian rencana kegiatan

guna mendapatkan masukan dan penyempurnaan di tingkat yang lebih besar; (g) Pelaksanaan dan pengorganisasian masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan tingkat perkembangan masyarakat; (h) Pemantauan dan pengarahan; (i) Evaluasi dan rencana tindak lanjut .

Kemudiaan tahapan-tahapan pelaksanaan PRA yang akan ditempuh adalah: (a) Penelusuran kondisi wilayah desa dari masa ke masa; (b) Pencatatan kalender musiman berdasarkan kebiasaan warga; (c) Gambaran pemetaan wilayah desa; (d) Penelusuran lokasi (Transect); (e) Pembuatan Diagram Venn (bagan hubungan kelembagaan); (f) Kajian mata pencaharian warga desa; (g) Pembuatan Matriks Ranking (bagan peringkat); (h) Penyusunan Rencana Kegiatan Spesifik Lokasi

4. **Implementasi PRA**

Dalam tahapan implementasi PRA, yang paling pokok dilakukan adalah penelusuran kondisi wilayah desa dari masa ke masa untuk mengungkap kembali apa saja yang telah terjadi atau dialami di wilayah desa tersebut. Hal ini dapat diperoleh dengan mewawancarai pihak-pihak yang berkompeten seperti unsur pemerintah desa, tokoh masyarakat untuk menanyakan apa-apa saja yang masih dapat diingat, sekaligus menceritakan kondisi saat ini. Informasi yang diharapkan akan diperoleh dari hasil wawancara itu antara lain tentang : (a) Sejarah terbentuknya kampung atau desa, nama desa dan asal-usul penduduknya; (b) Keberadaan dan pengelolaan sumberdaya alam yang ada di desa tersebut; (c) Perubahan status kepemilikan dan pemanfaatan lahan; (d) Aktivitas warga dalam pembangunan dan penerapan teknologi baru; (e) Pengalaman warga tentang terjadinya wabah penyakit; (f) Masalah-masalah yang dihadapi dan cara warga desa dalam mengatasinya; (g) Sejarah dan struktur organisasi pemerintahan desa,

Manfaat penelusuran kondisi wilayah desa dari masa ke masa ini adalah untuk melihat sisi baik dan buruk atas pemanfaatan potensi yang dimiliki, pengalaman keberhasilan dan kegagalan dalam pengelolaan sumberdaya. Selanjutnya informasi itu digunakan sebagai sumber inspirasi untuk bergerak ke depan secara lebih maju dan lebih baik.

5. Program "Membangun Desa :Desa Membangun"

Perspektif Hukum tentang Membangun Desa

Dalam pasal 1 UU Desa No 6/2014 dijelaskan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan NKRI.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Prinsip ini didasarkan pada pasal 67-68 UU Desa yang menyatakan bahwa Desa berkewajiban 1) Melindungi dan menjaga persatuan, kesatuan, serta kerukunan masyarakat Desa dalam rangka kerukunan nasional dan keutuhan NKRI, 2) Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Desa, 3) Mengembangkan kehidupan demokrasi, 4) Mengembangkan pemberdayaan masyarakat Desa, dan 5) Memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada

masyarakat Desa. Kemudian masyarakat Desa berkewajiban 1) Membangun diri dan memelihara lingkungan Desa, 2) Mmendorong terciptanya kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa yang baik, 3) Mendorong terciptanya situasi yang aman, nyaman, dan tenteram di Desa, 4) Memelihara dan mengembangkan nilai permusyawaratan, permufakatan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan di Desa, dan 5) Berpartisipasi dalam berbagai kegiatan di Desa.

6. Perencanaan Pembangunan Desa

Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis. Sedangkan Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

Perencanaan pembangunan merupakan suatu kumpulan kebijaksanaan dan program pembangunan untuk merangsang masyarakat dan swasta untuk menggunakan sumber daya yang tersedia secara lebih produktif. Arthur W. Lewis (2005). Perencanaan pembangunan adalah cara atau teknik untuk mencapai tujuan pembangunan secara tepat, terarah dan efisien sesuai dengan kondisi daerah yang bersangkutan. Sjafrizal (2014 : 24).

Perencanaan partisipatif adalah sebuah upaya membangun konsensus (kesepakatan) diantara beragam kepentingan yang ada di masyarakat dimana gesekan antar kepentingan dapat menjadi bagian dari dialog sebelum konsensus dapat mewujud.Perencanaan partisipatif juga merupakan "sebuah proses pengambilan keputusan dariseperangkat pilihan yang tersedia mengenai tujuan yang ingin dicapai di masa depan dan aksiaksi apa yang akan dilakukan untuk mencapainya dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia".

Dengan demikian, kesepakatan yang dibangun dalam perencanaan partisipatif meliputi tiga bidang yaitu 1) kesepakatan mengenai penetapan tujuan (atau visi/misi), 2) kesepakatan mengenai urutan aksi-aksi atau kegiatan yang akan dilakukan, dan 3) kesepakatan mengenai pengalokasian sumber daya yang tersedia guna mendukung pencapaian tujuan dan pelaksanaan aksi-aksi atau kegiatan. Kegiatan perencanaan dilakukan melalui metode partisipatif dengan cara pengkajianperdesaan secara partisipatif (PRA). Dalamperencanaan ini,komunitas dilibatkan dalam berbagai tahap, yaitu mengumpulkan, mengkategorikanmasalah, dan menganalisanya dan menemukan solusinya.Hal inilah yangdi sebut perencanaan partisipatif (Participatory Planning), dimana reprentasi dari setiaplapisan masyarakat menyuarakan aspirasinya ke dalam rencana-rencana yang berkaitandengan kehidupan mereka.Beberapa teknik yang digunakan adalah kajian sejarah,

transek lahan, pemetaan wilayah,analisa kerangka logis (logical frame work analysis), diskusi kelompok terfokus (Focus GroupDiscussion) dan konsultasi publik.

Dalam pasal 4 UU No 6/2014 dijelaskan beberapa tujuan pengaturan desa khususnya yang terkait dengan partisipasi masyarakat adalah 1)Melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat Desa, 2) Mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan Aset Desa guna kesejahteraan bersama, 3) Membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab, 4) Meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum, 5) Meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat Desa guna mewujudkan masyarakat Desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional, 6) Memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional; dan 7) Memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan.

METODE PENELITIAN

Lokasi penelitian di Desa Sepapan Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur. Dari jumlah 5 dusun yang ada, peneliti mengambil data pada dua dusun sesuai dengan keterbatasan penelitian yaitu Dusun Orong Bukal dan Batu Golok. Penelitian telah dilaksanakan mulai bulan Juli-Oktober 2020.

Penelitian ini menggunakan desain kualitatif. Menurut Keith Punch (2006), qualitative research is empirical research where the data are not in the form of number. Model karakteristik penelitian kualitatif akan sangat memudahkan peneliti dalam menemukan dan memahami pertanyaan penelitian, karena kualitatif menggunakan multiple methods that are interactive and humanistic (Creswell, 2012 : 167). Pendekatan kualitatif memiliki kelebihan dalam mengungkap fenomena dari kebiasaan lazim pemerintahan desa dalam menyusun perencanaan pembangunan. Kualitatif mempunyai fleksibilitas yang tinggi bagi peneliti ketika menentukan langkah-langkah penelitian.Penelitian kualitatif juga dapat memberi kesempatan ekspresi dan penjelasan yang lebih besar dalam bentuk penafsiran berdasarkan kepastian intuitif secara logis. Pada penelitian kualitatif peneliti juga dapat sekaligus berperan sebagai participant observer dengan kegiatan seperti mencatat, merekam dan mengamati (Jamaluddin Ahmad : 2015, 52).

Kemudiaan tipe penelitian ini yaitu deskriptif explanatory yang merupakan kombinasi antara penelitian deskriptif dan penelitian explanatory. Menurut Keith Punch (2006) tipe deskriptif explanatory adalah descriptive sets out to collect, organize and summarize information about the matter being studied while an explanatory study is on the other hand, sets out to explain and account for the descriptive information. Description is a more restricted purpose than explanation.

Penelitian deskriptif ditujukan untuk menjawab pertanyaan “apa”, sementara penelitian eksplanasi akan menjawab pertanyaan “mengapa” dan “bagaimana”. Kedua tipe penelitian ini digunakan untuk menemukan jawaban yang menyeluruh atas pertanyaan penelitian dalam mengidentifikasi dan mengeksplorasi.

Adapun yang akan menjadi subyek atau responden dalam penelitian ini adalah Kepala Desa, perangkat desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, kader desa dan perwakilan masyarakat desa.

Secara umum ada dua jenis observasi yaitu observasi partisipan dan non partisipan. Pada penelitian ini peneliti akan

menggunakan observasi non partisipan yaitu observasi yang memposisikan peneliti sebagai penyaksi yang tidak terlibat secara langsung dalam situasi sosial yang ada di masyarakat desa tersebut. Peneliti akan mengamati kegiatan pembangunan desa secara sekilas dan dan tidak terjun langsung dalam setiap program yang dilaksanakan oleh desa (Emzir: 40).

Jenis wawancara yang akan diguanakan pada penelitian ini adalah wawancara terbuka. Wawancara terbuka yaitu kegiatan mengajukan sejumlah pertanyaan kepada responden dengan tidak membatasi karakteristik pertanyaan maupun jawaban.Wawancara jenis ini dapat dikembangkan secara lebih luas dan terbuka di lapangan sesuai dengan keadaan dan situasi segmen penelitian.

Kegiatan dokumentasi dilakukan untuk memastikan apakah setiap rencana dan pelaksanaan program pembangunan desa sudah terdokumentasi (tersimpan) dengan baik atau tidak.Disamping itu dokumentasi juga dimaksudkan untuk memperkuat data-data pembangunan dan pemberdayaan yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara.

Model analisis data yang akan digunakan adalah model Miles dan Huberman. Ada tiga kegiatan pokok pada model ini yaitu reduksi data, menampilkan data dan menyimpulkan data. Kegiatan reduksi data adalah melakukan proses pemilihan, pemokusan, penyederhanaan, abstraksi dan pentransformasian "data mentah" yang terdapat pada hasil catatan-catatan lapangan. Penyajian data yaitu sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan penyajian data, peneliti dapat memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan berdasarkan pemahaman tentang penyajian data.Kemudian penarikan kesimpulan merupakan upaya peneliti untuk membuat suatu keputusan tentang status data, apakah data tersebut sudah status final atau masih perlu dilakukan verifikasi kembali atau bahkan diturunkan statusnya untuk dicek kembali ke lapangan.

Penelitian dengan desain evaluasi ini menghasilkan out put peneitian yaitu berupa Publikasi ilmiah di jurnal prodi (jurnal transpormasi) yang menggambarkan data tentang proses penerapan Model PRA dalam mewujudkan prinsip "membangun desa" dan "desa membangun".di Desa Sepapan Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur. Dan dari hasil penelitian ini menjadi salah satu model Pemberdayaan dalam mewujudkan prinsip "membangun desa" dan "desa membangun".

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Sejarah singkat berdirinya Desa Sepapan

Sejarah berdiri Desa Sepapan disebabkan karena adanya dorongan kuat dari masyarakat dan para tokoh. Dorongan tersebut muncul karena mayoritas masyarakat merasakan pelayanan pembangunan desa kurang merata dan jauhnya akses masyarakat dalam mengurus administrasi kependudukan.

Dalam pasal 53 Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 7 Tahun 2011 tersebut, Desa Sepapan berasal dari sebagian wilayah Desa Jerowaru yang terdiri atas 4 (empat) Dusun, yaitu : 1. Sepapan; 2.Orong Bukal, 3.Dasan Repok dan 4.Bare Due. Setelah pemekaran desa menjadi Desa Sepapan baru kemudian dilanjutkan dengan pemekaran dusun menjadi sembilan dusun yaitu dusun sepapan, orong bukal, bare due, rumes, sepapan bat, dasan repok, batu golok, tenten pejeruk dan batu golok.

Desa Sepapan terbentuk melalui perjuangan yang panjang dengan melibatkan beberapa orang tokoh

masyarakat sebagai inisiator. Dengan melihat penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di Desa Jerowaru pada saat itu yang semakin meningkat, sehingga membawa akibat bertambah beratnya tugas yang harus dilaksanakan oleh seorang Kepala Desa di wilayah kerjanya, lebih-lebih terhadap Desa yang wilayahnya luas dan jumlah penduduk yang besar serta dengan memperhatikan situasi, kondisi geografi dan demografi pada khususnya dan untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, maka akan sangat diperlukan untuk melakukan pemekaran wilayah desa dengan pembentukan sebuah desa baru.

Berangkat dengan niat untuk pemerataan dan mempermudah pelayanan kepada masyarakat, beberapa orang tokoh masyarakat telah mengadakan beberapa kali musyawarah dan mempunyai kesepakatan untuk mengusulkan pembentukan Desa Sepapan yang dihadiri oleh tokoh perwakilan masing-masing wilayah pemekaran meliputi wilayah Dusun Sepapan dan Dusun Orong Bukal.

Dalam membentuk sebuah desa berdasarkan Peraturan Bupati No 12 Tahun 2009 minimal wilayah kekadusan adalah sebanyak 3 (tiga) dusun, maka kami masyarakat khususnya di wilayah barat Kekadusan Sepapan sekaligus mengajukan usulan pemekaran khususnya di Dusun Sepapan dengan membentuk 2 (dua) buah dusun baru sebagai bagian wilayah kerja pemerintahan desa yaitu Dusun Dasan Repok dan Dusun Bare Due.

Aspirasi dan antusiasme masyarakat yang menginginkan pemekaran ini menjadi dasar utama untuk mengusulkan Pembentukan Desa Sepapan , karena berangkat dari permasalahan itu, upaya yang dapat dilakukan adalah dengan melaksanakan program pemekaran desa. Melalui program ini dapat dimungkinkan persoalan pelayanan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta persoalan koordinasi diharapkan dapat dituntaskan. Jangkauan wilayah yang cukup luas dan jumlah penduduk yang cukup padat merupakan faktor-faktor yang memunculkan persoalan tersebut, sehingga alternatif yang paling tepat adalah melaksanakan program pemekaran desa dan membentuk Desa Sepapan.

Akhirnya Desa Sepapan dibentuk dengan Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 38 Tahun 2011 (Berita Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2011 Nomor : 183) sebagai hasil pemekaran dari Desa Jerowaru dan diresmikan pada tanggal 15 September Tahun 2011 dalam status Desa Persiapan. Kemudian Desa Sepapan didefinitifkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 7 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2011 Nomor : 7) yang berlaku sejak tanggal diundangkan yaitu tanggal 28 Nopember 2011.

2. Profil Masyarakat Desa Sepapan

Mayoritas masyarakat Desa Sepapan adalah masyarakat petani dan buruh tani. Menurut sekretaris desa Muanris, sekitar 69 % masyarakat menggantungkan hidupnya dari hasil pertanian, dan sebagian kecil saja yang menjadi pedagang, guru dan aparat pemerintahan desa dan dusun. Dari sebaran data aktivitas kehidupan masyarakat Desa Sepapan, terlihat jelas bahwa sektor pertanian menjadi andalan masyarakat untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya. Sektor pertanian yang paling dominan adalah tembakau yang ditanam satu kali

setahun, padi dan sebagian kecil palawija dan holtikultura.

Adapun visi Desa Sepapan adalah "Terwujudnya Masyarakat Desa Sepapan Yang Mapan, Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik dan Besrih Serta Kehidupan Masyarakat yang Aman, Tentram dan Beriman" Visi tersebut dituangkan ke dalam rumusan misi yaitu: (1) Menyelenggarakan Pemerintahan Desa yang Transparan, Akuntabilitas, Partisipatif dengan menjunjung nilai-nilai agama, adat istiadat dan kearifan budaya lokal yang ada; (2) Menjalin koordinasi yang baik antar lembaga-lembaga desa sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing lembaga; (3) Membangun sarana dan prasarana berbasis kebutuhan masyarakat guna mewujudkan masyarakat yang sejatera dan mandiri; (4) Pemberdayaan kaum perempuan dan pemuda yang kreatif dengan memberikan fasilitas berupa modal usaha dan pembinaan kewirausahaan; (4) Memperhatikan dan memberikan bantuan sosial kepada masyarakat miskin, yatim piatu dan anak-anak terlantar;(5) Pemanfaatan sumber daya alam yang ada dalam pemenuhan kebutuhan dan hajat hidup masyarakat; (6) Menciptakan situasi lingkungan hidup yang indah, bersih serta bebas polusi dan pencemaran; (7) Menciptakan stabilitas keamanan masyarakat yang baik dan harmonis.

3. Program Desa

Menurut penjelasan Sekretaris Desa Sepapan bapak Munaris, sebagai desa baru program-program yang dilaksanakan di Desa Sepapan masih berkisar program rutin desa. Ada dua program rutin yang dilaksanakan desa yaitu :

Program Infrastruktur Desa, Menurut penjelasan Kaur Perencanaan bapak Munaris, program infrastruktur desa yang kami laksanakan berdasarkan amanah pemerintah yang tertuang dalam dokumen program Program Pembangunan Infrstruktur Perdesaan (PPIP). Dasar itulah program infrastruktur di Desa Sepapan di laksanakan dan diorientasikan untuk beberapa hal yaitu : (a) Melibatkan Masyarakat Miskin

Pada umumnya program PPIP dilaksanakan untuk memberikan peluang kepada masyarakat miskin terlibat pada program tersebut. Keterlibatan masyarakat miskin dapat terlihat pada saat pelaksanaannya yang melibatkan secara langsung masyarakat miskin dan kaum perempuan, baik dalam proses sosialisasi pemerintah daerah kepada masyarakat hingga pelaksanaan pembangunan fisik berupa pembukaan jalan baru dari Dudun Batu Golok menuju Dusun Sepapan Bat. Program gotong royong juga dapat melibatkan masyarakat miskin, dan ini sudah berjalan dengan baik yang dapat dilihat dari saling bekerjasamanya warga masyarakat Dusun Orong Bukal dan Dusun Batu Golok dalam hal perbaikan jembatan yang menjadi akses atau penghubung langsung ke dua dusun tersebut. Jembatan tersebut rusak karena banjir bandang yang terjadi pada akhir 2017 yang lalu. Dalam kegiatan perbaikan jembatan itu, masyarakat kedua dusun dengan rasa antusias karena warga masyarakat menilai kebermanfaatan yang akan mereka terima mulai dari penyerapan tenaga kerja dan kemudahan akses mobilitas yang diterima.

Selain itu, bentuk gotong royong yang dilakukan Dusun Orong Bukal dan Dusun Batu Golok ini adalah memberikan swadaya sebagian tenaga kerja untuk ikut membangun jalan desa maupun jembatan tadi. Tentu hal ini dapat menekan pengeluaran upah pekerja kasar untuk dapat menambah jarak pembangunan jalan yang

dibutuhkan oleh masyarakat. Di dalam meningkatkan keterlibatan dan peran aktif masyarakat dalam mendukung program pembangunan infrastruktur perdesaan sudah cukup baik dengan kehadiran dalam musyawarah rencana pembangunan desa untuk menentukan jenis kegiatan pembangunan untuk pembangunan program PPIP itu sendiri. Keterlibatan dan peran aktif masyarakat dalam musyawarah rencana pembangunan desa ini didukung oleh masyarakat karena adanya keinginan perubahan dalam masalah akses untuk mobilitas masyarakat terutama masyarakat Dusun Orong Bukal dan Dusun Batu Golok.

Tipe Manfaat utama yang diperoleh masyarakat dari PPIP ini adalah terbukanya akses yang lebih banyak yang menjadi jalur keluar masuk masyarakat ke lahan pertaniannya. Menurut Kadus Batu Golok Badrun, dengan perbaikan dan ditalutnya akses jalan Batu Golok ke Dusun Tenten Pejeruk semakin memudahkan masyarakat ke dua dusun untuk saling mengunjungi dan berhubungan pada saat mereka saling meminta bantuan untuk keperluan pekerjaan sistem harian di lahan pertanian masing-masing. Diketahui bahwa masyarakat Desa Sepapan yang mayoritas petani khususnya petani tembakau, dalam sistem kerja mereka antara petani dengan buruh tani saling ketergantungan satu dengan yang lain. Dengan adanya jalur atau akses yang semakin baik akan mempercepat koordinasi dan kerjasama masyarakat petani tersebut, inilah manfaat sangat besar yang dirasakan dari program infrastruktur.

Menurut Kaur Pelayanan Zainul Hadi, pelaksana program PPIP harus memiliki kapasitas dan kemampuan yang sesuai dengan bidangnya. Pelaksana memiliki keahlian dan berdedikasi tinggi dalam pelaksanaan tugas sehingga program dapat berjalan dengan baik dan efektif. Pelaksana program PPIP sudah memiliki mekanisme tetap dan SOP nya ada juga. Gabungan tim pelaksana dari unsur kabupaten, fasilitator masyarakat untuk menjadi pelaksana di setiap desa dan kecamatan. Fasilitator Masyarakat (FM) yang mendampingi pada saat perencanaan pembangunan memiliki bidang keahlian pada bidang teknik dan ekonomi. Hal ini untuk merencakan Rancangan Anggaran dan Biaya pelaksanaan pembangunan jalan serta komposisi jalan tersebut oleh fasilitator di bidang teknik. Sedangkan tim pelaksana kabupaten yang menjadi petugas lapangan atau satker yang mendampingi pelaksanaan pembangunan jalan secara teknis mempunyai bidang keahlian yang mumpuni di bidang pembangunan jalan dan jembatan seperti teknik sipil, teknik arsitektur, dan teknik elektro. Menurut Munaris, tim pelaksana kabupaten ini merupakan gabungan sumberdaya daya manusia dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lombok Timur, dan tenaga konsultan profesional.

Aspek-aspek sumberdaya yang dilibatkan dalam program PPIP pada sumberdaya manusia baik kualitas maupu kuantitas telah memenuhi kebutuhan masyarakat, berikut dengan kesesuaian dana telah sesuai karena adanya penyesuaian di dalam Rancangan Anggaran dan Biaya yang sudah diperhitungkan termasuk untuk biaya pemeliharaan yang disisihkan sebesar Rp. 5.000.000,00 dari jumlah dana PPIP dengan tambahan masyarakat melakukan swadaya. Menurut kaur keuangan Desa Sepapan Ali Fahri, besaran dana program PPIP yang telah ditetapkan pusat sebesar Rp. 100.000.000,00 diserahkan kepada desa untuk membangun fasilitas fisik berdasarkan kebutuhan desa dengan di

fasilitasi tim pelaksana kabupaten untuk mendampingi beserta fasilitator masyarakat yang sudah memahami program PPIP ditujukan serta dengan bidang keahlian secara teknis untuk pembangunan jalan desa, jalan dusun dan perbaikan sanitasi desa. Anggaran yang diberikan ditransfer kepada OMS yang dibentuk dengan cara berangsur-angsur dengan tujuan melihat progress dan partisipasi masyarakat untuk terlibat aktif dalam program PPIP. Penggunaan dana yang telah dianggarkan, OMS juga perlu mempertimbangkan biaya yang akan dikeluarkan untuk pembangunan yang dibutuhkan, maka masyarakat Desa Sepapan mengadakan swadaya berupa tenaga untuk memaksimalkan pembangunan jalan yang panjang dan sanitasi dengan anggaran yang telah ditetapkan.

Musrenbang Tingkat Kecamatan Jerowaru

Musrenbang Desa Sepapan

4. Strategi Pelaksanaan Program

Dalam menyukseskan program, strategi pemerintah dalam program pembangunan infrastruktur perdesaan adalah dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat sebagai bentuk pengenalan dan memberikan pemahaman mengenai tahapan-tahapan program yang direncakan dan dilaksanakan langsung oleh masyarakat. Tingkat partisipasi masyarakat sejak saat sosialisasi, musyawarah dusun dan musyawarah desa diikuti dengan antusias dan aktif termasuk kehadiran kaum miskin dan kaum perempuan sebagai sasaran utama dari program pembangunan infrastruktur perdesaan. Menurut tokoh masyarakat Dusun Orong Bukal H. Nasrullah, keterlibatan masyarakat akan terkendala apabila musim tanam dan panen tembakau tiba. Pada kondisi ini masyarakat sangat sulit terlibat karena hampir semua baik petani terutama buruh tani tembakau berada di sawah saat petik daun tembakau dan dirumah sampai malam saat melipat membersihkan daun tembakau. Oleh karena itu agar program pemerintah terutama infrastruktur bisa berjalan lancar dan mendapat dukungan

penuh dari masyarakat harus dilaksanakan di luar musim tembakau dan tanam padi.

5. Karakteristik Lembaga Penyelenggara

Menurut kaur pemerintahan Desa Sepapan Supardi Halik, karakteristik lembaga yang menjadi pelaksana program pembangunan infrastruktur adalah tidak memiliki konflik kepentingan. Konflik kepentingan antar dusun dengan intensitas terjadinya konflik hanya sekali terjadi pada saat musyawarah penentuan jenis kegiatan dan lokasi prioritas pembangunan untuk akses jalan dan dapat diselesaikan dengan musyawarah antara masyarakat, Pemerintah Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Selain itu, konflik terjadi pada saat pembangunan jalan yang dilaksanakan di Dusun Orong Bukal dan Dusun Batu Golok sempat berjalan mundur dari jadwal target awal perencanaan. Hal ini terjadi karena adanya pergantian musim dan sumber air dengan sistem penjadwalan sehingga terkendalanya mendapatkan sumber air untuk pembangunan jalan sehingga penyelesaian pembangunan jalan menjadi mundur dari target.

Respon masyarakat Desa Sepapan terhadap program infrastruktur sangat antusias, hal ini dapat dilihat dari jumlah kehadiran pada saat musyawarah rencana pembangunan desa yang diikuti oleh berbagai lapisan masyarakat termasuk kaum miskin dan kaum perempuan sebagai target sasaran program. Hal ini juga berarti memudahkan implementator (pemerintah kabupaten) untuk menjalankan program dan dukungan masyarakat memberikan dampak positif bagi jalannya program. Respon masyarakat Desa Sepapan pun dapat dilihat dari keeratan gotong royong yang diperlihatkan masyarakat untuk mewujudkan pembangunan infrastruktur di dusun Dusun Orong Bukal dan Dusun Batu Golok dengan swadaya tenaga dari masyarakat kedua dusun. Program infrastruktur ini memang tidak berdampak secara langsung terhadap peningkatan dan kesejahteraan ekonomi masyarakat, akan tetapi dengan dibukanya akses jalan dan diperbaikinya jalan lama tentu akan memudahkan masyarakat untuk keluar masuk lahan pertaniannya terutama saat membawa hasil pertanian pulang dengan menggunakan mobil.

Penerimaan masyarakat terhadap program pembangunan infrastruktur di Desa Sepapan telah memenuhi target pemerintah, ini dapat dilihat dari antusiasme masyarakat yang baik karena masyarakat merasakan akan manfaat dari pembukaan jalan, perbaikan jalan, perbaikan jembatan dan sanitasi. Dalam program infrastruktur itu masyarakat ikut terlibat gotong royong membangun jalan karena program PPIP merupakan program berbasis pemberdayaan masyarakat, artinya program yang diserahkan kepada masyarakat sebagai stakeholder yang secara langsung terlibat sejak proses perencanaan sampai pada pemeliharaan jalan dan pemanfaatan pembangunan jalan dan sanitasi adalah untuk masyarakat sendiri. Semua lapisan masyarakat dapat terlibat yaitu tokoh masyarakat, kaum perempuan, dan kaum miskin.

6. Program Posyandu

Secara teori tujuan penyelenggaraan posyandu adalah untuk : 1) Menurunkan angka kematian ibu dan anak, 2) Meningkatkan pelayanan kesehatan ibu untuk menurunkan angka kematian bayi (IMR atau *infant mortality rate*), 3) Mempercepat penerimaan NKKBS atau norma keluarga kecil bahagia dan sejahtera, 4) Meningkatkan kemampuan

masyarakat untuk mengembangkan kegiatan kesehatan dan menunjang peningkatan hidup sehat, 5) Pendekatan dan pemerataan pelayanan kesehatan kepada masyarakat sehingga tercapai peningkatan cakupan pelayanan kesehatan, 6) Meningkatkan dan membina peran serta masyarakat dalam rangka alih teknologi untuk usaha kesehatan masyarakat. Sedangkan sasaran program posyandu adalah seluruh masyarakat dan utamanya bagi bayi usia kurang dari 1 tahun, anak balita usia 1 sampai 5 tahun, ibu hamil, ibu melahirkan, ibu nifas dan ibu menyusui, dan wanita usia subur (WUS). Fungsi posyandu adalah sebagai wadah pemberdayaan masyarakat dalam alih informasi dan keterampilan dari petugas kepada masyarakat dan antar sesama masyarakat dalam rangka mempercepat penurunan anga kematian ibu dan angka kematian bayi dan sebagai wadah untuk mendekatkan pelayanan kesehatan dasar terutama berkaitan dengan penurunan angka kematian ibu dan angka kematian bayi.

Menurut kader posyandu Farida, kegiatan posyandu di Desa Sepapan kerjasama dengan puskesmas yang di Kecamatan Jerowaru. Kegiatan posyandu dilaksanakan setiap sebulan sekali, untuk tanggal dan waktunya ditentukan oleh kader, tim penggerak PKK desa serta petugas kesehatan dari puskesmas. Secara teknis pelayanan kesehatan masyarakat dilakukan dengan sistem 5 meja, yaitu meja 1 untuk pendaftaran, meja 2 untuk penimbangan, meja 3 untuk pengisian KMS (Kartu Menuju Sehat), meja 4 untuk komunikasi atau penyuluhan perorangan berdasarkan KMS dan meja 5 untuk tindakan. Pada pelayanan tindakan ini dilakukan imunisasi, pemberian vitamin A dosis tinggi berupa obat tetes mulut tiap bulan Februari dan Agustus, pengobatan ringan, pembagian pil atau kondom, konsultasi KB-Kesehatan. Petugas pada meja 1 sampai dengan 4 dilaksanakan oleh kader posyandu, sedangkan meja 5 dilaksanakan oleh petugas kesehatan.

MMD (Musyawarah Masyarakat Desa Sepapan) di Puskesmas Jerowaru

7. Program Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)

Kegiatan posyandu terdiri dari 5 program utama, yaitu Kesehatan Ibu dan Anak yang sering disingkat KIA. Pelayanan yang diberikan adalah untuk ibu hamil, ibu nifas, ibu menyusui, bayi, dan balita. Menurut bidan di puskesmas Jerowaaru Saadah, tujuan dari usaha kesehatan ibu dan anak atau KIA ada empat, pertama untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada ibu-ibu secara teratur dan terus-menerus pada waktu sakit dan sembuh pada masa antepartum, intrapartum,

postpartum, dan masa menyusui serta pemeliharaan anak-anak dari mulai lahir sampai masa prasekolah. Kedua, KB diberikan pada ibu-ibu atau suami-suami yang membutuhkannya. Ketiga, untuk mengadakan integrasi ke dalam pelayanan kesehatan menyeluruh. Keempat, untuk mencari dan mengumpulkan masalah-masalah mengenai ibu, bayi, dan anak untuk dicari penyelesaiannya. Kemudian kami juga memantau pertumbuhan dan perkembangan bayi secara periodik. Cara yang dilakukan adalah a) Timbang berat badannya tiap bulan di posyandu, b) Rangsang perkembangan anak sesuai umurnya, c) Ajak anak bermain dan bercakap-cakap, d) Bawa anak ke petugas kesehatan untuk mendapatkan pelayanan stimulasi deteksi dan intervensi dini tumbuh kembang (SDIDTK), umur 0-1 tahun sebanyak 4 kali dalam setahun serta umur 1-6 tahun sebanyak 2 kali tiap tahun, e) Minta kader mencatatnya di KMS.

Berbicara tentang kesehatan perempuan menurut Saadah, dapat mempengaruhi semua aspek kehidupan, baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat. Sampai sekarang, masyarakat kita memahami bahwa pelayanan kesehatan bagi perempuan selalu diartikan sebagai layanan kesehatan selama kehamilan dan melahirkan. Padahal sebagian besar perempuan mengalami tiga masalah gangguan kesehatan, yaitu kurang gizi, terlalu sering hamil, dan kelelahan.

Kemduian terkait dengan program Keluarga Berencana (KB). Program KB merupakan salah satu cara yang paling efektif untuk meningkatkan ketahanan keluarga, kesehatan, dan keselamatan ibu, anak, serta perempuan. Pelayanan KB menyediakan informasi, pendidikan, dan cara-cara bagi laki-laki dan perempuan untuk dapat merencanakan kapan akan mempunyai anak, berapa jumlah anak, berapa tahun jarak usia antara anak, serta kapan akan berhenti mempunyai anak. Menurut kami, baik suami maupun istri memiliki hak yang sama untuk menetapkan berapa jumlah anak yang akan dimiliki dan kapan akan memiliki anak. Melalui tahapan konseling pelayanan KB, pasangan usia subur (PUS) dapat menentukan pilihan kontrasepsi sesuai dengan kondisi dan kebutuhannya berdasarkan informasi yang telah mereka pahami, termasuk keuntungan dan kerugian, resiko metode kontrasepsi dari petugas kesehatan. Pelayanan KB di posyandu dapat berupa : pemberian pil dan kondom dan suntikan jika tenaga kesehatan ada yang dapat melakukan suntikan. Seorang ibu perlu untuk ikut KB dikarenakan agar ibu tidak cepat hamil lagi (minimal 2 tahun) serta agar ibu punya waktu merawat kesehatan diri sendiri, anak, dan keluarga.

Fungsi utama dari imunisasi adalah dapat melindungi anak dari penyakit, mencegah anak cacat, serta mencegah kematian anak. Imunisasi hepatitis B misalkan dapat mencegah hepatitis B (kerusakan hati). Imunisasi BCG dapat mencegah TB atau tuberkolosis (sakit paru-paru). Imunisasi polio dapat mencegah polio (lumpuh layuh pada tungkai kaki dan lengan tangan). Imunisasi DPT (Difteri, Pertusis, Tetanus) dapat mencegah difteri (penyumbatan jalan napas), pertusis atau batuk rejan (batuk 100 hari), tetanus. Imunisasi campak dapat mencegah campak (radang paru, radang otak, dan kebutaan). Menurut aturan kata Farida (kaer desa) jadwal imunisasi meliputi : umur 0 sampai 7 hari, imunisasi yang diberikan adalah HB 0; umur 1 bulan imunisasi yang diberikan adalah polio 1; umur 2 bulan imunisasi yang diberikan adalah polio 2; umur 3 bulan imunisasi yang diberikan adalah polio 3; umur 4 bulan imunisasi yang

diberikan adalah polio 4; umur 9 bulan imunisasi yang diberikan adalah Campak.

Kegiatan Imunisasi di Desa Sepapan

Selanjutnya pencegahan diare di posyandu dilakukan dengan cara penyuluhan pemberian LGG yang dibuat sendiri oleh masyarakat atau pemberian oralit. Secara ketentuan penanganan diare dapat melakukan a) Memberikan segera cairan oralit setiap anak buang air besar, b) Jika tidak ada oralit, beri air matang, kuah sayur, atau tajin, c) Jika anak masih menyusu, terus berikan ASI dan makanan pengganti ASI, d) Jangan beri obat apapun kecuali dari petugas kesehatan, e) Berikan obat *zinc* sesuai dosis selama 10 hari berturut-turut, f) Larutkan obat zinc dalam satu sendok makan air matang.

Diakhir wawancara, bidan Saadah menyampaikan pesan dasar terkait KIA dan masyarakat secara umum yaitu a) Makanlah aneka ragam makanan, b) Makanlah makanan untuk memenuhi kecukupan energi, c) Makanlah makanan sumber karbohidrat, setengah dari kebutuhan energi, d) Batasi konsumsi lemak dan minyak sampai seperempat dari kebutuhan energi, e) Gunakan garam beriodium, f) Makanlah makanan sumber zat besi, g) Berikan ASI saja kepada bayi sampai umur empat bulan, h) Biasakan makan pagi, i) Minumlah air bersih, aman yang cukup jumlahnya, j) Lakukan kegiatan fisik dan olahraga secara teratur, k) Hindari minum minuman beralkohol, l) Makanlah makanan yang aman bagi kesehatan, m) Bacalah label pada makanan yang dikemas dalam bungkus atau kotaknya.

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Fokus penelitian ini adalah mendeskripsikan dan menganalisis gambaran program pembangunan yang dilaksanakan oleh Desa Sepapan yang berstatus sebagai desa baru. Desa Sepapan Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur berdiri pada tanggal 15 September 2011. Adapun yang menjadi kesimpulan penelitian ini ada dua yaitu program pembangunan infrastruktur perdesaan (PPIP) dan program posyandu desa. Pada

pelaksanaan PPIP, yang menjadi titik tekannya adalah pada partisipasi dan swadaya masyarakat desaa. Program gotong royong atau padat karya menjadi wadah yang dapat melibatkan masyarakat miskin khususnya. Program padat karya sudah berjalan dengan baik yang dapat dilihat dari saling bekerjasamanya warga masyarakat Dusun Orong Bukal dan Dusun Batu Golok dalam hal perbaikan jembatan yang menjadi akses atau penghubung langsung ke dua dusun tersebut. Dengan perbaikan dan ditalutnya akses jalan Batu Golok ke Dusun Tenten Pejeruk juga semakin memudahkan masyarakat ke dua dusun untuk saling mengunjungi dan berhubungan pada saat mereka saling meminta bantuan untuk keperluan pekerjaan sistem harian di lahan pertanian masing-masing.

Kemudian pada program posyandu, yang paling mendasar adalah KIA dan kesehatan masyarakat yaitu a) Makanlah aneka ragam makanan, b) Makanlah makanan untuk memenuhi kecukupan energi, c) Makanlah makanan sumber karbohidrat, setengah dari kebutuhan energi, d) Batasi konsumsi lemak dan minyak sampai seperempat dari kebutuhan energi, e) Gunakan garam beriodium, f) Makanlah makanan sumber zat besi, g) Berikan ASI saja kepada bayi sampai umur empat bulan, h) Biasakan makan pagi, i) Minumlah air bersih, aman yang cukup jumlahnya, j) Lakukan kegiatan fisik dan olahraga secara teratur, k) Hindari minum minuman beralkohol, l) Makanlah makanan yang aman bagi kesehatan, m) Bacalah label pada makanan yang dikemas dalam bungkus atau kotaknya.

2. Saran-saran

Adapun saran-saran yang dapat disampaikan berdasarkan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Bagi Pengelola; Bagi pemerintah desa disarankan untuk lebih mendekatkan program-program yang dicanangkan oleh desa, program yang lebih inovatif dan lebih banyak melibatkan partisipasi masyarakat.; (2) Bagi Masyarakat Sekitar Masyarakat diharapkan dapat memberikan informasi terkait kebutuhan-kebutuhan prioritas dan mendasar kepada pemerintah desa melalui Kadus maupun pada kegiatan Musrenbang dusun dan desa sebagai dasar pemerintah desa dalam merencanakan program yang lebih strategis dan efektif.

Bagi Peneliti selanjutnya: Melakukan kajian dan analisis kembali pada tema yang sama dengan perspektif yang berbeda, karena disadari bahwa temuan pada penelitian kali ini masih jauh dari harapan.

DAFTAR PUSTAKA

Ali, Mohammad.1999. Penelitian Kependidikan: Prosedur dan Strategi. Bandung: Angkasa. Arikunto, Suharsimi. 2000.

Anonim, 2015, Pengertian dan Pemberdayaan Masyarakat .

Chadwick, A. Bruce, dkk. (1984). *Metode penelitian ilmu sosial*. New Jersey: ice hall, inc. Englewood cliffts.

Gol A Gong & Agus M.Irkhham, Gempa Literasi (2012) Penerbit Kepustakaan Populer Gramedia (KPG) Jakarta

https://baleite.ntbprov.go.id/en/kode-wilayah-jumlah-penduduk-jumlah-keluarga-luas-wilayah-dan-kepadatan-penduduk-tahun-2015

http://sepapan.sideka.id/data/kependudukan/

http://specialpengetahuan.blogspot.co.id/2015/09/pengertian-dan-pemberdayaan-masyarakat.html(akses 12 Maret 2019)

https://www.inirumahpintar.com/2016/09/pengertian-dan-ciri-ciri-rumah-pintar.html (akses 14 Maret 2019)

Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka Finoza, L.2001. Komposisi.Jakarta : Nusa Indah

Masri Singarimbun. 1987. Metode Penelitian Survai. Yogyakarta: LP3ES.

Pendidikan Kesetaraan Mencerahkan Anak Bangsa, Direktorat Pendidikan Kesetaraan, Dirjen Pendidikan Luar Sekolah, Departemen Pendidikan Nasional, 2006).

Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis. Jakarta: Rineka Cipta. Daryanto.2000.

Purwanto (2007) Instrumen Penelitian Sosial dan pendidikan; Pengembangan dan Pemanfaatan, Pen.Pustaka Pelajar Yogyakarta.

Sugiono (2011). Statistik Non Parametrik untuk penelitian. Pen. Alvabeta Bandung.